

**PENERAPAN KODE ETIK PUSTAKAWAN DI PERPUSTAKAAN UTSMAN
BIN AFFAN UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Perpustakaan Jurusan Ilmu Perpustakaan
Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

IRFAN PRAMADI FARYD
NIM. 40400111157

**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irfan Pramadi Faryd
NIM : 40400111157
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 01 April 1993
Jurusan : Ilmu Perpustakaan
Fakultas/Program : Adab dan Humaniora/Strata Satu (S1)
Alamat : Jln. DR. J. Leimena Komp. IDI Blok D/1, Kelurahan
Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
Judul : Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan
Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia
Makassar.

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 14 November 2016

Penyusun,

IRFAN PRAMADI FARYD

NIM: 40400111157

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara, Nama : Irfan Pramadi Faryd, NIM : 40400111157, Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul *“Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar”*. Memandang bahwa skripsi telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang *munaqasyah*.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

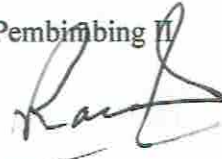
Samata, 14 November 2016

Pembimbing I



St. Husaebah Pattah, S. Ag, SS, M. Hum.
NIP : 19711005 199903 2 002

Pembimbing II



Drs. M. Jayadi, M. Ag.
NIP : 19521101 197903 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "*Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar*", yang disusun oleh Irfan Pramadi Faryd, NIM : 40400111131, mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan pada Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah disetujui dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 14 November 2016, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Perpustakaan (S.IP), pada Fakultas Adab dan Humaniora Jurusan Ilmu Perpustakaan, dengan beberapa perbaikan.

Samata, 29 November 2016

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Hj. Syamzan Syukur, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Himayah, S.Ag., S.S.,MIMS.	(.....)
Munaqisy I	:Hildawati Almah, S.Ag., S.S.,MA.	(.....)
Munaqisy II	: Marni, S.IP., M.IP.	(.....)
Pembimbing I	: St. Husaebah Pattah, S.Ag., S.S., M.Hum.	(.....)
PembimbingII	: Drs. M. Jayadi, M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
UIN Alauddin Makassar,



Dr. H. Barsihannor, M.Ag.
NIP: 19691012 196603 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan semesta alam, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Dengan nikmat-Nya berupa nikmat kesehatan dan kesempatan, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. *Allahummasholli 'ala Muhammad*. Nabi penutup zaman, nabi yang menjadi tuntunan seluruh umat Islam hingga akhir zaman.

Ucapan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada orang tua tercinta, Fatmah Djumriah & Ayahanda Ir. Faryd Sjahrullah, kepada seluruh keluarga dan sahabat yang turut berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini hingga tahap akhir, baik berupa materi, tenaga, doa, dan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Ilmu Perpustakaan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Semoga jasa-jasanya dapat dibalas oleh Allah SWT. Amin.

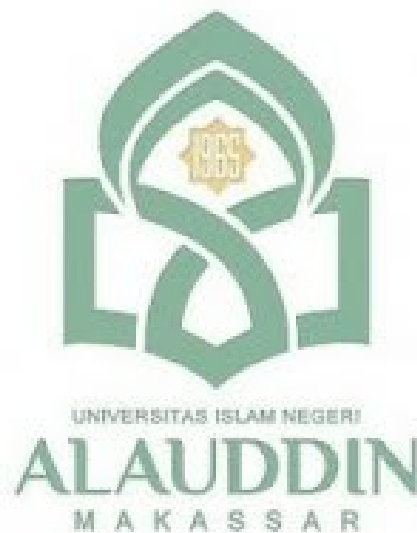
Banyak tantangan yang dihadapi oleh penulis dalam melakukan proses penulisan skripsi ini sebagai rangkaian dari tugas akhir seorang mahasiswa dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi yakni Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Setelah penulisan skripsi ini rampung dan dianggap lengkap, namun tentu saja masih banyak kekurangan yang ditemui dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Terlepas dari itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak terkait yang berperan penting dalam pencapaian yang sudah diraih oleh penulis hingga hari ini. Ucapan terima kasih yang tulus ingin saya ungkapkan kepada:

1. Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si., selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II, III, dan IV UIN Alauddin Makassar.

2. Dr. H. Barsihannor, M.Ag. selaku dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Abd. Rahman R., M.Ag Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. H. Syamzan Syukur, M.Ag selaku wakil dekan bidang administrasi umum & perencanaan keuangan dan Dr.Abd. Muin, M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. A. Ibrahim, S.Ag., S.S., M.Pd. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar dan Himayah, SS., MIMS, Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Perpustakaan, UIN Alauddin Makassar.
5. St. Husaebah Pattah, S.Ag, SS, M.Hum selaku Pembimbing I dan Drs. M. Jayadi, M.Ag. Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyelesaian ini, mulai dari penyusunan draft proposal hingga skripsi ini selesai.
6. Hildawati Almah, S.Ag., SS., M.Hum selaku penguji I dan Marni, S.IP., M.IP selaku penguji II yang telah mengoreksi dan memberikan masukan untuk penyempurnaan isi skripsi penulis.
7. Segenap Dosen Ilmu Perpustakaan dan para staf Fakultas Adab dan Humaniora, khususnya Bapak Quraisy Mathar, S.Sos., M.Hum, Bapak Taufiq Mathar, S.Pd., MLIS, Ibu Sitti Husaebah Pattah, S.Ag., SS., M.Hum, dan Ibunda Dr. Hj. Gustia Tahir sebagai dosen penguji komprehensif, dan Pak Ali Akbar sebagai staf tata usaha yang selalu berkorban waktu untuk menyelesaikan berkas mahasiswa dan telah banyak membantu dan mengarahkan penulis hingga ketaraf penyelesaian.
8. Staf Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah membantu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis dalam proses penyelesaian tulisan ini.

9. Teman-teman se-Jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis mulai dari proses perkuliahan hingga tahap penyelesaian penulis.
10. Teman-teman KKN Posko Kecamatan Pallangga KKN Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar angkatan ke-50.



DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	10

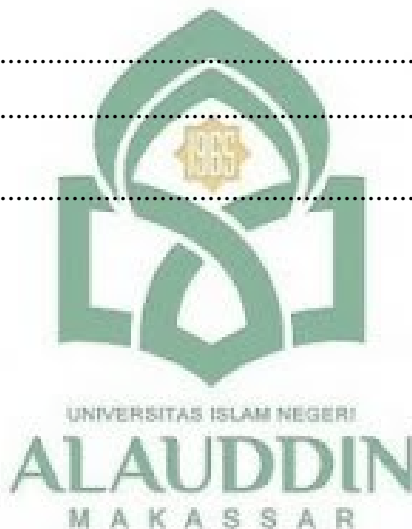
BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Kode Etik Pustakawan	12
1. Kode Etik.....	12
2. Profesi Pustakawan.....	17
3. Kode Etik Pustakawan.....	24
B. Substansi Kode Etik Pustakawan Indonesia.....	30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

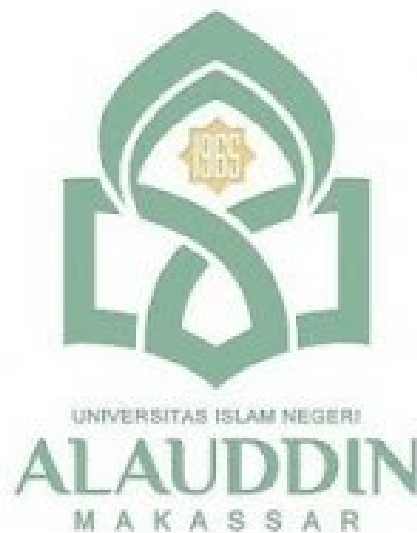
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Sumber Data	42
D. Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	43

E. Teknik Analisis dan Pengolahan Data.....	45
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar	47
B. Kendala yang dihadapi Pustakawan dalam Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar.....	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar.....	37
----------	--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pejabat Struktural	
	Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia	
	Makassar.....	38
Tabel 2	Jadwal Proses Penelitian	
	Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia	
	Makassar.....	41
Tabel 3	Informan Penelitan	
	Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia	
	Makassar.....	42



ABSTRAK

Nama : IRFAN PRAMADI FARYD
Nim : 40400111157
Jurusan : Ilmu Perpustakaan
Judul Skripsi : Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar

Skripsi ini membahas tentang penerapan kode etik pustakawan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar. Pokok permasalahan skripsi ini adalah bagaimana penerapan kode etik pustakawan dan apa kendala yang dihadapi oleh pustakawan dalam melakukan penerapan kode etik pustakawan.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan kode etik pustakawan dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar oleh pustakawan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penulis melakukan wawancara dengan informan yang terlibat langsung dengan penerapan kode etik khususnya pustakawan pada bagian sirkulasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan alat bantu pedoman wawancara dan alat perekam suara. Teknis analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan Kode Etik Pustakawan informan atau pustakawan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar sudah menerapkan sikap dasar pustakawan dalam hal hubungan dengan pemustaka, hubungan dengan sesama pustakawan dan hubungan dengan masyarakat, dan kendala yang dihadapi pustakawan dalam penerapan kode etik pustakawan khususnya pada bagian sirkulasi yaitu tidak meratanya jenjang pendidikan perpustakaan, kurangnya pengetahuan pustakawan mengenai sikap dasar pustakawan dan tidak mengetahui kode etik sebagai seorang pustakawan yang profesional, kurangnya bakat pustakawan dalam berkomunikasi dan bergaul, sehingga pustakawan bersikap tidak ramah dalam melayani.

Kata Kunci: Kode Etik Pustakawan, Perpustakaan Utsman Bin Affan, Universitas Muslim Indonesia Makassar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perpustakaan sebagai salah satu pusat informasi bertugas menyediakan koleksi yang mutakhir dan relevan dengan kebutuhan pemustaka serta menyediakan fasilitas, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan layanan informasi untuk dapat dimanfaatkan oleh pemustaka secara efektif dan efisien. Melimpahnya informasi dalam berbagai jenis maupun bentuk media, mengharuskan pustakawan untuk melakukan perubahan terhadap perpustakaan yang peranannya sebagai mediator informasi, fasilitator, dan pendamping pendidik. Selain tempat pembelajaran, perpustakaan dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi yang menyenangkan dan menambah wawasan pengunjung mengenai ilmu pengetahuan. Perpustakaan yang baik dapat dilihat dan diukur dari keberhasilannya dalam memenuhi kebutuhan pemakainya dan dapat melayani dengan kemampuan yang dimiliki pustakawan kepada masyarakat pemakainya.

Seorang pustakawan yang profesional harus memiliki etika dalam melakukan pekerjaannya, karena dalam etika terdapat pengetahuan tentang moral. Kode etik pustakawan merupakan pedoman bagi pustakawan dalam menjalankan tugasnya. Kode etik akan menjadi pegangan, tuntunan moral dan rujukan bagi setiap pustakawan. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan

yang tidak profesional. Kode etik pustakawan mengatur dan sebagai pedoman kerja bagi pustakawan. Kode etik pustakawan berisikan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh pustakawan.

Kondisi tersebut merupakan tantangan bagi pustakawan dalam memberikan kontribusi kinerja yang memuaskan sesuai dengan harapan pemustaka. Kinerja merupakan kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawab dengan hasil seperti yang diharapkan.

Kinerja yang dilakukan oleh para pustakawan menyangkut juga pelayanan yang diberikan kepada pustakawan pada satu lembaga perpustakaan. Karena keberhasilan dari suatu perpustakaan tidak lepas dari pelayanan yang baik kepada pemustaka.

Pustakawan dalam memberikan pelayanan, harus menyenangkan serta memberikan kemudahan-kemudahan kepada pemustaka, maka pustakawan dituntut untuk memberikan kontribusi yang optimal, dalam artian pelayanan pustakawan yang berorientasi pada pemustaka.

Pelayanan pustakawan seharusnya mencerminkan kode etik pustakawan yaitu yang pertama adalah harus bersikap sopan, ramah, melayani dengan wajah ceria dan komunikatif kepada pemustaka; yang kedua adalah pustakawan dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka harus mampu bersikap luwes, kemudian berusaha mengetahui kemauan dari pemustaka; yang ketiga adalah memberikan pelayanan sampai tuntas, kemudian menjamin kerahasiaan

informasi yang dicari oleh pemustaka, mau mendengarkan keluhan, tidak berprasangka negatif dalam melayani pemustaka dan mengucapkan terima kasih. Kegiatan yang di atas juga merupakan usaha pustakawan dalam meningkatkan kualitas kinerjanya dalam pelayanan pustakawan, sehingga upaya tersebut akan benar-benar terwujud dan pustakawan diharapkan mengimplementasikan kode etik pustakawan dalam memberikan pelayanan (Hermawan dan Zen, 2006: 124-136) .

Ayat yang berkaitan dengan masalah kode etik Q.S Luqman ayat 18-19 :

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri, Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” (Departemen Agama, 1989: 645)

Bersamaan dengan perintah amar makruf nahi mungkar, bersabar atas segala konsekuensinya, dan semua resiko yang harus dihadapi dan menimpa diri, maka seorang dai harus beradab dengan adab seorang dai yang merupakan penyeru kepada Allah. Yaitu, agar tidak sombong terhadap manusia sehingga dengan perilaku tersebut dia merusak perkataan baik yang telah dia serukan dengan contoh buruk yang dilakukannya, janganlah kamu memalingkan muka kamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi

dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan, sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai (Jalaluddin, 2000: 261-262).

Dalam uraian ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa manusia dituntut untuk saling berbuat baik antar sesamanya dan menjauhkan diri dari sifat kesombongan, kaitannya dalam peprustakaan yang merupakan tempat atau pusat sumber informasi tentunya sebagai seorang pustakawan dimana dalam memberikan pelayanan yang baik tentunya pada setiap pemustaka harus bersikap sopan dan santun.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 35 b , menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan (Republik Indonesia, 2010: 91).

Amrih Peni dalam hasil penelitiannya tahun 2012 yang berjudul *“Persepsi Pustakawan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia: Studi Kasus di Perpustakaan Universitas Indonesia”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pustakawan di Perpustakaan Universitas Indonesia terhadap kode etik pustakawan, terkait dengan pemahaman dan implementasi kode etik pustakawan dalam menjalankan tugas profesi sebagai pustakawan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada informan yang merupakan pustakawan di Perpustakaan Universitas Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Setelah melakukan analisis secara mendalam terhadap hasil penelitian

tentang *Persepsi Pustakawan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia: Studi Kasus di Perpustakaan Universitas Indonesia*, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan informan dalam penelitian ini memahami bahwa kode etik pustakawan merupakan kumpulan peraturan atau pedoman yang digunakan dalam menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Walaupun informan dalam penelitian ini kurang memahami isi dari Kode Etik Pustakawan Indonesia secara tektual, namun perilaku para informan sudah mencerminkan implementasi dari kode etik pustakawan tersebut.

Sutina Kusnan Tirayoh dalam hasil penelitiannya tahun 2015 yang berjudul “*Persepsi Pustakawan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pustakawan di Perpustakaan Universitas Indonesia terhadap kode etik pustakawan, terkait dengan pemahaman dan implementasi kode etik pustakawan dalam menjalankan tugas profesi sebagai pustakawan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Informannya ialah pustakawan yang bertugas di layanan referensi 1 (satu) orang, pustakawan yang bertugas di layanan umum 8 orang, pustakawan yang bertugas di layanan sirkulasi 2 (dua) orang, dan pustakawan yang bertugas di layanan anak 1 orang. Hingga informan pada penelitian ini berjumlah 12 (dua belas) orang. Penelitian ini dilakukan di Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif

adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Setelah melakukan analisis secara mendalam terhadap hasil penelitian tentang *Persepsi Pustakawan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara*, dari hasil penelitian di peroleh bahwa pustakawan di Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara sudah memahami kode etik atas profesinya. Walaupun isi dari kode etik tersebut tidak begitu di mengerti tetapi secara keseharian perilaku dan sikap dari pustakawan sudah menerapkan kode etik tersebut. Artinya implementasi dari kode etik tersebut sudah dilakukan oleh pustakawan dalam tugas dan tanggung jawab atas profesinya.

Kesamaan tulisan atau hasil penelitian di atas sama sekali tidak ada kesamaan dengan penelitian ini, dari hasil penelitian terdahulu, seperti yang diuraikan di atas tentunya lebih memotivasi penulis untuk memungkinkan melakukan penelitian yang bertalian dengan Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Keberadaan kode etik ini begitu penting bagi pustakawan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar. Dengan adanya kode etik ini, pustakawan mempunyai alat yang dapat dijadikan sebagai pedoman standar untuk memahami tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya karena

kinerja yang sesuai dengan standar dapat meningkatkan citra dan status profesi pustakawan di masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya pustakawan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar melaksanakan pekerjaannya secara profesional berdasarkan kode etikanya. Namun, pada pelaksanaannya masih banyak pustakawan yang belum tahu tentang adanya kode etik tersebut. Adapun pustakawan yang sudah tahu, tetapi belum melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Sehubungan dengan itu penulis berkeinginan melakukan penelitian tentang “Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah penerapan kode etik pustakawan Indonesia dalam melakukan pelayanan di bagian sirkulasi terhadap pemustaka di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar dan kendala yang dihadapi pustakawan dalam menerapkan kode etik pustakawan dalam melakukan pelayanan di bagian sirkulasi terhadap pemustaka di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar.

2. Deskripsi Fokus

- a. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dirumuskan (Ali, 1995: 1044).
- b. Menurut (Hermawan dan Zen, 2006: 123-149), kode etik diimplementasikan dalam berbagai kegiatan berikut yaitu pergaulan di masyarakat, pelayanan kepada masyarakat, hubungan dengan rekan sejawat, hubungan dengan atasan dan penampilan pribadi.
- c. Suwarno (2010: 108-109) mengemukakan bahwa kode etik pustakawan adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi standar tingkah laku yang berlaku bagi profesi pustakawan dalam rangka melaksanakan kewajiban profesionalnya di dalam kehidupan masyarakat.
- d. Sikap dan perilaku pustakawan merupakan bagian yang sangat penting dalam etiket layanan perpustakaan. Dalam prakteknya sikap dan perilaku menunjukkan kepribadian seseorang dan citra lembaga perpustakaan. Sikap dan perilaku yang baik, harus ditunjukkan oleh pustakawan, terutama yang bertugas dibagian layanan seperti layanan sirkulasi. Sikap dan perilaku pustakawan yang ditunjukkan oleh pustakawan kepada pengunjung/pengguna jasa perpustakaan, mulai dari pengunjung datang sampai ia selesai menggunakan jasa layanan perpustakaan. Dalam hal ini bersifat kepada tingkah laku yang dilakukan oleh pustakawan selama melayani pengunjung/pengguna perpustakaan.

- e. Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar sering mendapatkan kendala-kendala yang berhubungan dengan pelayanan di perpustakaan seperti layanan sirkulasi. Pustakawan masih kurang memahami tugas dan profesinya sebagai pustakawan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan kode etik pustakawan dalam melakukan pelayanan di bagian sirkulasi terhadap pemustaka di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar ?
2. Apa kendala yang dihadapi pustakawan dalam melakukan penerapan kode etik pustakawan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar ?

D. Kajian Pustaka

Ada beberapa referensi yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian tentang Penerapan Kode Etik Pustakawan, yaitu :

1. “*Manajemen dan Organisasi Perpustakaan*” Muh. Quraissy Mathar (2012: 82). Pengertian kode etik merupakan pedoman atau standar kinerja pustakawan dalam memberikan layanan di perpustakaan yang akan sulit dievaluasi jika pedoman tersebut hanya dalam bentuk satuan moral tanpa ada kesepakatan yang dibuat secara tertulis dan disepakati oleh seluruh anggota komunitas.

2. *“Implementasi Kode etik Pustakawan dalam meningkatkan kualitas kinerja pelayanan pustakawan di Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara”*, Risno Mbonuong, Journal Volume II. No. 4. Tahun 2013. Kode etik pustakawan mengatur dan sebagai pedoman kerja bagi pustakawan. Tujuan kode etik pustakawan adalah agar pustakawan profesional dalam memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemustaka.
3. *“Etika Kepustakawanan: suatu pendekatan terhadap Profesi dan Kode Etik Pustakawan Indonesia”* Rahman Hermawan dan Zulfikar Zen, (2006: 123-149). Kode etik diimplementasikan dalam berbagai kegiatan berikut: Pergaulan di masyarakat, Pelayanan kepada masyarakat, Hubungan dengan rekan sejawat, hubungan dengan atasan, Penampilan pribadi.
4. *“Pengetahuan Dasar Kepustakaan”* Wiji Suwarno, (2010: 92). Pengertian kode etik yaitu sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang baik bagi profesional.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kode etik pustakawan sudah diterapkan dalam melaksanakan pekerjaan oleh pustakawan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar.

- a. Untuk mengetahui apakah kode etik pustakawan sudah diterapkan dalam melakukan pelayanan di bagian sirkulasi terhadap pemustaka oleh

pustakawan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar.

- b. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi pustakawan dalam menerapkan kode etik pustakawan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut :

- a. Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makasar, sebagai salah satu bahan masukan dalam menerapkan kode etik pustakawan.
- b. Peneliti, dapat dijadikan sebagai acuan oleh peneliti lain yang akan melakukan penelitian aspek yang sama metode yang berbeda di masa mendatang.
- c. Program Studi, sebagai khasanah pengetahuan dan wawasan tentang kode etik pustakawan.
- d. Penulis, melalui penelitian ini penulis dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan dan pemahaman tentang kode etik pustakawan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kode Etik Pustakawan

1. Kode Etik

Kode etik dilihat dari segi asal usul kata (etimologis) terdiri dari dua kata yaitu kode dan etik. Dalam bahasa Inggris terdapat berbagai makna dari kata *code* di antaranya tingkah laku, perilaku, peraturan perundang-undangan, dan kata etik bermakna sejumlah aturan moral atau prinsip perilaku untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah.

Sulistyo-Basuki (2004: 436) menyatakan kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

Menurut Salam (1997: 150) kode etik merupakan ikhtisar mengenai nilai-nilai profesi yang menegaskan dan merinci aturan-aturan mengenai perilaku terhadap mana para anggotanya harus memihak dan melibatkan diri agar mereka tetap dapat berpenampilan baik dalam organisasi profesinya.

Pendapat lain pengertian kode etik menurut Mathar (2012: 82) merupakan pedoman atau standar kinerja pustakawan dalam memberikan layanan di perpustakaan yang akan sulit dievaluasi jika pedoman tersebut hanya dalam bentuk

satuan moral tanpa ada kesepakatan yang dibuat secara tertulis dan disepakati oleh seluruh anggota komunitas.

Pengertian kode etik juga dikemukakan oleh Suwarno (2010: 92) yaitu sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang baik bagi professional.

Sehingga dapat dikemukakan bahwa pengertian dari kode etik adalah seperangkat standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang diharapkan dapat menuntun anggotanya dalam menjalankan peranan dan tugas profesinya dalam masyarakat.

a. Tujuan Kode Etik

Pada dasarnya tujuan organisasi profesi menciptakan kode etik suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi. Hermawan dan Zen (2006: 84) memberikan penjabaran mengenai tujuan kode etik dari suatu organisasi profesi yaitu:

1) Menjaga Martabat dan Moral Profesi

Salah satu hal yang harus dijaga oleh suatu profesi adalah martabat dan moral. Agar profesi itu mempunyai martabat yang perlu dijaga dan dipelihara adalah moral. Profesi yang mempunyai martabat dan moral yang tinggi, sudah pasti akan mempunyai citra atau *image* yang tinggi pula di masyarakat. Untuk itu, profesi membuat kode etik yang akan mengatur sikap dan tingkah laku anggotanya, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, kode etik profesi sering

disebut juga sebagai kode kehormatan profesi, jika kode etik dilanggar maka nama baik profesi akan tercemar, berarti merusak martabat profesi.

2) Memelihara Hubungan Antar Profesi

Kode etik juga dimaksudkan untuk memelihara hubungan antar anggota. Dalam kode etik diatur hak dan kewajiban kepada antar sesama anggota profesi. Satu sama lain saling hormat menghormati dan bersikap adil, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan mampu mendukung keberhasilan bersama.

3) Meningkatkan Pengabdian Anggota Profesi

Dalam kode etik dirumuskan tujuan pengabdian profesi, sehingga anggota profesi mendapat kepastian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, biasanya kode etik merumuskan ketentuan bagaimana anggota profesi melayani masyarakat. Dengan adanya ketentuan itu, para anggota profesi dapat meningkatkan pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan tanah air serta kemanusiaan.

4) Meningkatkan Mutu Profesi

Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat kewajiban agar para anggota profesinya berusaha untuk memelihara dan meningkatkan mutu profesi. Selain itu, kode etik juga mengatur kewajiban agar para anggotanya mengikuti perkembangan zaman. Setiap anggota profesi berkewajiban memelihara dan meningkatkan mutu profesi, yang pada umumnya dilakukan dalam wadah organisasi profesi.

5) Melindungi Masyarakat Pemakai Profesi

Profesi, seperti hal profesi pustakawan adalah melayani masyarakat. Melalui kode etik yang dimiliki, dapat melindungi pemakai jasa. Ketika ada anggota profesi melakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan sebagai pekerja profesional, maka kode etik adalah rujukan bersama.

Hal ini juga dikemukakan oleh Ernawan (2007: 125) tujuan dibuatnya kode etik adalah, menjunjung martabat profesi atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan material para anggotanya.

Sehingga maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik yaitu:

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas moral.
- b. Menjaga dan meningkatkan keterampilan teknis.
- c. Melindungi kesejahteraan materiil dari para penganut profesi

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tujuan dibuatnya kode etik profesi yaitu untuk menjunjung moral dan martabat dari suatu profesi, meningkatkan mutu dari profesi, memelihara hubungan dan meningkatkan kesejahteraan para anggota.

b. Fungsi Kode Etik

Pada dasarnya kode etik memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pelindung dan pengembangan bagi profesi. Menurut Ernawan (2007: 125) yaitu:

- 1) Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin.
- 2) Sarana kontrol sosial.
- 3) Pengembangan patokan yang lebih tinggi.
- 4) Pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa fungsi dari kode etik yaitu sebagai sarana kontrol sosial, memberikan pedoman dan panduan bagi anggota profesi, untuk mencegah kesalahpahaman dan untuk mengevaluasi diri.

c. Penetapan Kode Etik

Kode etik adalah salah satu ciri dan kelengkapan suatu profesi. Oleh sebab itu, setiap profesi yang bekerja secara profesional mutlak memiliki kode etik. Kode etik berisi kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh para anggota profesi. Kode etik suatu profesi tidak dapat ditetapkan oleh pihak luar, misalnya, pemerintah, melainkan harus ditetapkan oleh para pelaku profesi itu sendiri, yang tergabung dalam organisasi profesinya.

Penetapan kode etik suatu profesi, lazimnya dilakukan pada suatu acara tertentu, misalnya dalam kongres organisasi profesi. Penetapan kode

etik suatu profesi, tidak dapat dilakukan secara perseorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus khusus untuk itu, dan atas nama organisasi profesi itu. Semua orang yang menjalankan pekerjaan profesi itu dan tergabung dalam organisasi profesi secara otomatis terikat dengan kode etik yang telah disepakati (Hermawan dan Zen, 2006: 86).

2. Profesi Pustakawan

Profesi adalah suatu pekerjaan yang melaksanakan tugasnya memerlukan atau menuntut keahlian (*expertise*), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang tinggi. Keahlian yang diperoleh dari lembaga pendidikan khusus diperuntukkan untuk itu dengan kurikulum yang dapat dipertanggung jawabkan. Seseorang yang menekuni suatu profesi tertentu disebut profesional, sedangkan profesional sendiri mempunyai makna yang mengacu kepada sebutan orang yang menyangkut suatu profesi dan sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Profesi pustakawan sering menimbulkan polemik di tengah masyarakat, bahkan di kalangan pustakawan sendiri. Tak banyak orang yang mengenal dan mengetahui siapa itu pustakawan dan apa pekerjaannya. Masyarakat umumnya tahu bahwa di perpustakaan ada pekerja yang memberikan layanan informasi, namun seringkali mereka tidak tahu siapakah yang disebut pustakawan itu.

Kata pustakawan berasal dari kata “pustaka”, dengan penambahan kata “wan” diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau profesinya terkait erat dengan dunia pustaka atau bahan pustaka. Bahan pustaka dapat berupa buku,

majalah, surat kabar, bahan pandang dengar, dan multi media. Dalam bahasa Inggris pustakawan disebut sebagai “*librarian*” yang juga terkait erat dengan kata “*library*”, dalam perkembangan selanjutnya, istilah pustakawan diperkaya lagi dengan istilah-istilah lain, meskipun hakekat pekerjaannya sama, yaitu sama-sama mengolah informasi diantaranya pakar informasi, pakar dokumentasi, pialang informasi, manajer pengetahuan dan sebagainya (Hermawan dan Zen, 2006: 45).

Menurut Hasugian (2009: 137) “Pustakawan adalah orang yang memberikan dan melaksanakan kegiatan perpustakaan dalam usaha pemberian pelayanan / jasa kepada pengguna perpustakaan sesuai dengan misi yang diemban oleh badan induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi yang diperolehnya melalui pendidikan”.

Menurut Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) sebagai sebuah asosiasi dari profesi pustakawan yang menghimpun pustakawan di seluruh Indonesia, dalam kode etiknya menyatakan bahwa Pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu pengetahuan, dokumentasi dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan (Hermawan dan Zen, 2010: 105).

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 pasal 8 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk

melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan (Republik Indonesia, 2010:).

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa seorang pustakawan yang profesional dibidang perpustakaan telah memberikan pelayanan sesuai tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu pengetahuan, dokumentasi dan informasi yang dimiliki melalui pendidikan.

Eksistensi tenaga profesional pustakawan telah diakui pemerintah secara resmi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara No.18/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pustkawan dan diperbaharui dengan SK Menpan No.33 Tahun 1990 yang kemudian diperbaharui kembali dengan SK Menpan No.132 Tahun 2002. Para ahli atau pemerhati pustakawan pun secara jelas mengakui eksistensi pustakawan sebagai suatu profesi. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari profesi, yaitu:

- a. Keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis. Seseorang profesional harus memiliki pengetahuan teoritis dan keterampilan mengenai bidang teknik yang ditekuni dan bisa diterapkan dalam pelaksanaanya atau prakteknya dlam kehidupan sehari-hari.
- b. Asosiasi profesional merupakan suatu badan organisasi yang biasanya diorganisasikan oleh anggota profesi yang bertujuan untuk meningkatkan status para anggotanya.
- c. Pendidikan yang ekstensi. Profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan tinggi. Seorang profesional

dalam bidang teknik mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi baik itu dalam suatu pendidikan formal ataupun non formal.

- d. Ujian kompetisi. Sebelum memasuki organisasi profesional, biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji terutama pengetahuan teoritis.
- e. Pelatihan institusional. Selain ujian, juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional dimana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Peningkatan keterampilan melalui pengembangan profesional juga dipersyaratkan.
- f. Lisensi profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya.
- g. Otonomi kerja profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoretis mereka agar terhindar dari adanya intervensi dari luar.
- h. Kode etik organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan.
- i. Mengatur diri organisasi profesi harus bisa mengatur organisasinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Profesional diatur oleh mereka yang lebih senior, praktisi yang dihormati, atau mereka yang berkualitas paling tinggi.
- j. Layanan publik. Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat.

- k. Status dan imbalan yang tinggi. Profesi yang paling sukses akan meraih status yang tinggi, prestise, dan imbalan yang layak bagi para anggotanya. Hal tersebut bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap layanan yang mereka berikan bagi masyarakat.

Jika ditilik dari segi kualifikasinya pustakawan dibagi menjadi pustakawan profesional, semiprofesional, dan teknisi (Sulistyo-Basuki, 1991: 151-203). Pustakawan profesional adalah tenaga yang memiliki sertifikat atau diploma setingkat diploma 2 dalam ilmu perpustakaan, sedangkan teknisi merupakan tenaga perpustakaan yang berpendidikan SLTA ke bawah dengan pendidikan kepustakawanan satu tahun atau kurang.

Profesi pustakawan di Indonesia sudah bisa dikatakan sebagai sebuah profesi, karena profesi pustakawan di Indonesia sendiri telah memenuhi beberapa ciri dari profesi, seperti :

- a. Adanya Sebuah Asosiasi Atau Organisasi Keahlian.

Dengan adanya sebuah asosiasi atau organisasi keahlian, maka sebuah profesi yang bersangkutan sudah bisa dikatakan sebagai sebuah profesi yang profesional. Organisasi profesi berhak melakukan ujian dan kualifikasi bagi pustakawan serta menjaga kepentingan profesi.

- b. Terdapat Pola Pendidikan Profesi yang Jelas.

Profesi didasarkan atas batang tubuh teori atau teknik yang dapat diajarkan. Hal ini berarti bahwa subjek tersebut dapat diperlukan sebagai sebuah disiplin akademis serta pekerjaan profesional harus memiliki intelektual juga.

c. Adanya Kode Etik

Kode etik akan mengatur hubungan antara tenaga profesional dengan nasabah atau rekan. Namun kode etik profesi pustakawan lebih bersifat sosial daripada bisnis, lain halnya dengan kode etik dokter, pengacara, dan akuntan.

d. Berorientasi pada jasa

Kepustakawanan berorientasi pada jasa, dengan pengertian jasa perpustakaan dengan pembaca memerlukan pengetahuan dan teknik khusus yang harus dimiliki pustakawan. Pustakawan tidak memungut imbalan dari pembacanya dan pustakawan dapat dihubungi setiap kali berada di perpustakaan dengan tidak memandang keadaan pembaca.

e. Adanya Tingkat Kemandirian

Sebagai tenaga profesional maka tenaga tersebut harus mandiri, dalam artibebas dari campur tangan pihak luar.

Menurut Hemawan dan Zen (2006 : 130-138) Adapun sikap-sikap dalam memberikan pelayanan yang baik terhadap pengguna yaitu mengenal pengguna, luwes dalam melayani, mengetahui kemauan pengguna, mempromosikan produk layanan, melayani sampai tuntas, tidak memaksakan kehendak, melayani dengan wajah yang ceria, menjamin kerahasiaan, mau mendengarkan keluhan, tidak berprasangka negatif dan mengucapkan terima kasih.

Dalam memberikan pelayanan kepada pengguna perpustakaan dan informasi, pustakawan harus memperhatikan penampilan pribadinya. Dengan penampilan

pribadi yang anggun, pelayanan akan berlangsung dengan baik dalam suasana yang menyenangkan. Adapun penampilan pustakawan dalam memberikan pelayanan yaitu:

- a. Wajar Pustakawan harus mampu tampil atau bersahaja, sehingga dapat diterima oleh siapapun, baik atasan, rekan sejawat maupun masyarakat pada umumnya. Pustakawan tidak boleh tinggi hati. Tampil wajar, artinya tampil bersahaja, tidak over ekting, tidak lebih atau tidak kurang. Wajar harus terlihat dalam tingkah laku, berpakaian, berucap dan bertutur kata sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam lingkungannya.
- b. Jujur Kejujuran adalah sikap mental yang positif yang perlu dikembangkan untuk menjaga kredibilitas seseorang. Kejujuran merupakan sendi utama dalam pergaulan manusia. Kejujuran akan menumbuhkan kepercayaan dari orang lain, baik dari atasan, rekan maupun pengguna, kejujuran dapat menjaga citra diri seseorang. Kejujuran mengakui kelebihan dan kelemahan diri sendiri dan orang lain adalah sikap profesional.
- c. Berpakaian Sopan Pustakawan harus tahu etika berpakaian, pustakawan dalam melaksanakan tugasnya harus berpakaian sopan. Berpakaian sopan artinya bagi wanita pakaiannya bersih, rapi tidak boleh terlihat auratnya.
- d. Tampil Tenang Pustakawan harus bisa tampil tenang, tidak gugup, ketika melihat banyak pengunjung perpustakaan yang harus dilayani. Jangan terburu-buru agar pelayanan tidak menjadi berantakan dan tidak memuaskan.
- e. Murah Senyum Pustakawan dalam melaksanakan tugasnya harus tampil ceria dan senyum, sehingga menunjukkan pribadi yang optimis dan profesional.
- f. Bertutur Kata Baik Pustakawan harus bisa bertutur kata baik. Keterampilan

bertutur kata baik tidak datang dengan sendirinya, tetapi perlu belajar, latihan, dan perlu pengalaman. Semakin sering dilatih akan semakin pandai bertutur kata baik. Bertutur kata yang baik harus dilakukan kepada siapa saja. Pustakawan yang mampu bertutur kata yang baik menunjukkan bahwa ia adalah pustakawan profesional.

- g. Pandai Bergaul Pustakawan harus pandai bergaul, baik dengan rekan, atasan maupun pengguna. Karena pustakawan dalam menjalankan tugasnya selalu berhubungan dan berinteraksi dengan manusia. Pergaulan mempunyai etika, oleh karena itu pustakawan dalam pergaulannya harus berpegang pada etika pergaulan.

3. Kode Etik Pustakawan

Kode etik pustakawan pertama kali muncul di negara barat dalam sebuah paper di *Prant Institute Library School* tahun 1903. Pada tahun 1922 muncul sebuah proposal kode etik dalam *Annual of the American Academy of Political and Social Science*. Proposal ini terdiri dari 30 bagian, yang dianalisis secara profesional dan ditampilkan oleh *Council of American Library Association* pada bulan Desember 1929. Pada tahun 1939, kode etik ini ditampilkan secara lengkap di *ALA Bulletin* terdiri dari lima bagian besar, yaitu (a) hubungan pustakawan dengan pemerintah, (b) hubungan pustakawan dengan pemakai, (c) hubungan pustakawan dengan staf di perpustakaan, (d) hubungan pustakawan dengan profesinya, dan (e) hubungan pustakawan dengan masyarakat. Kemudian direvisi oleh “*Code of Ethics Committee of the ALA*” (Hermawan dan Zen, 2010: 96-97)

Lasa (2009: 174) menyatakan bahwa kode etik pustakawan adalah norma atau aturan yang harus dipatuhi pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalisme.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Pasal 36 ayat 1, memberikan batasan pengertian kode etik pustakawan adalah Norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan profesionalitas.

Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) menegaskan bahwa kode etik pustakawan adalah panduan perilaku dan kinerja semua anggota pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dibidang kepustakawanan (IPI, 2006: 43).

Suwarno (2010: 108-109) mengemukakan bahwa kode etik pustakawan adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi standar tingkah laku yang berlaku bagi profesi pustakawan dalam rangka melaksanakan kewajiban profesionalnya di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kode etik pustakawan Indonesia Pasal 1, kode etik pustakawan Indonesia merupakan:

- a. Aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan;
- b. Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap pustakawan;

- c. Ketentuan mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat dan negara.

Seperti yang kita telah ketahui bahwa kode etik merupakan suatu aturan atau norma-norma tentang perilaku apa yang baik dan apa yang benar yang harus dilakukan bagi anggota profesi pada bidang tertentu. Dan kalau dihubungkan dengan profesi pustakawan maka kode etik pustakawan adalah serangkaian aturan atau norma-norma tentang tingkah laku yang dirumuskan secara tertulis, dan kemudian menjadi sebagai pedoman, dan aturan dalam bekerja secara professional oleh para pustakawan.

a. Tujuan Kode Etik Pustakawan

Tujuan kode etik pustakawan sangat berperan penting dalam membangun perkembangan dan membina karakter pustakawan tersebut. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan pasti mempunyai tujuan tertentu, begitu juga terhadap kode etik pustakawan, adapun tujuan dari kode etik pustakawan menurut para ahli adalah seperti yang dibawah ini. Tujuan kode etik sebenarnya adalah untuk mengatur ruang gerak para profesional agar memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabah dan mencegahnya dari perbuatan yang tidak profesional (Suwarno, 2010: 92).

Kode etik pustakawan mengatur dan sebagai pedoman kerja bagi pustakawan, tujuan kode etik pustakawan adalah agar pustakawan profesional dalam memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemustaka. Beberapa tujuan dari kode etik pustakawan menurut (Hermawan dan Zen, 2006: 99) yaitu:

- 1) Meningkatkan pengabdian pustakawan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara. Sebagai makhluk ilahi, serta warga negara yang baik, dengan dituntun oleh kode etik, pustakawan dapat memberikan pengabdian sebagai hamba, dan berbakti kepada sesama, terutama untuk bangsa dan negara.
- 2) Menjaga martabat pustakawan. Adalah tugas anggota untuk selalu menjaga martabat dan kehormatan pustakawan dengan berlandaskan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat.
- 3) Meningkatkan mutu profesi pustakawan. Untuk dapat memberikan layanan kepustakawan terhadap masyarakat, maka anggota profesi berkewajiban untuk meningkatkan mutu profesi dan anggota melalui berbagai kegiatan, baik melalui pendidikan formal, non-formal atau informal.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan, terutama layanan informasi kepada masyarakat; mendapatkan informasi, adalah merupakan hak setiap orang, maka pustakawan sebagai pekerja informasi harus berupaya agar kuantitas dan kualitas informasi yang diberikan selalu meningkat sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Dalam kode etik pustakawan Indonesia Pasal 2, kode etik profesi pustakawan mempunyai tujuan:

- 1) Membina dan membentuk karakter pustakawan;
- 2) Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial;

- 3) Mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat;
- 4) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa tujuan dari kode etik pustakawan adalah menjaga martabat pustakawan, meningkatkan mutu dari profesi pustakawan, meningkatkan kualitas layanan dan mencegah kesalahpahaman dan konflik antar anggota dan masyarakat.

b. Manfaat Kode Etik Pustakawan

Kode etik memberikan manfaat terhadap profesi, anggota dan masyarakat, menurut (Hermawan dan Zen, 2006: 101-103) memberikan penjelasan secara rinci manfaat kode etik adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Bagi profesi

Manfaat kode etik bagi profesi adalah sebagai berikut:

- a) Dasar formal dari suatu organisasi yang profesional.
- b) Sebagai indikator bahwa pekerjaan pustakawan adalah matang dan bertanggung jawab.
- c) Kode etik akan membantu anggota memiliki standar kinerja.

2) Manfaat Bagi Anggota

Manfaat kode etik bagi anggota profesi adalah sebagai berikut:

- a) Anggota profesi memiliki tuntutan moral dalam melaksanakan tugas profesinya.
- b) Menjamin hak pustakawan dan pekerja informasi untuk berpraktik.
- c) Dapat memelihara kemampuan, keterampilan, dan keahlian para anggota.

3) Manfaat Bagi Masyarakat

Manfaat kode etik bagi masyarakat adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan mutu layanan terhadap masyarakat.
- b) Memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhannya, jika ada layanan yang diberikan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.
- c) Memberi perlindungan hak akses terhadap informasi.

c. Fungsi Kode Etik Pustakawan

Fungsi kode etik pustakawan sangat berperan penting sekali dalam kode etik pustakawan, agar pustakawan dapat lebih profesional dalam bekerja. Berbagai macam kegiatan pasti mempunyai fungsi dalam organisasi, begitu juga dengan kode etik pustakawan. Fungsi kode etik pustakawan menurut para ahli seperti dibawah ini.

Rusel dalam Hermawan, (2006: 100) menyatakan bahwa fungsi kode etik bagi pustakawan adalah sebagai berikut. 1) Mendorong para anggota untuk bertingkah laku secara profesional; 2) mendorong anggota untuk mematuhi “*LA's Charter and byelaws*” dapat dijelaskan mendorong anggota untuk mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kode etik pustakawan; 3) menuntut anggota mereka tidak memilih berperilaku yang berprasangka terhadap kedudukan

atau asosiasi pustakawan; 4) memasyarakatkan anggota untuk bekerja profesional; 5) tugas utama anggota adalah melayani pelanggan; 6) menempatkan anggota dengan kewajiban; 7) anggota harus memberikan kemampuan mereka dengan baik; 8) anggota tidak boleh dengan sengaja menyajikan bahan pustaka yang mendorong terjadinya diskriminasi; 9) anggota tidak boleh membocorkan rahasia; 10) menjamin setiap tindakan dan keputusan berdasarkan pertimbangan profesi.

B. Substansi Kode Etik Pustakawan Indonesia

Kode etik yang digunakan di Indonesia adalah kode etik yang dibuat oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) yaitu Kode Etik Pustakawan (KEP) Indonesia. Kode etik pustakawan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AD/ ART IPI yang dimulai sejak tahun 1993. Kemudian diperbaharui pada tahun 1997 dan disempurnakan kembali pada tahun 2002, dan revisi terakhir dari Kode Etik Pustakawan hingga saat ini yaitu kode etik yang diterbitkan bersamaan dengan AD/ ART IPI pada tahun 2009.

Kode Etik Pustakawan Indonesia sebenarnya tidak berbeda jauh dengan kode etik pustakawan dari negara lain. Di dalam kode etik terdapat ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi oleh semua anggota organisasi profesinya beserta sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan. Pustakawan yang menjadi anggota profesi adalah pustakawan yang telah sepakat bergabung dalam organisasi profesi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), sehingga setiap anggota profesi harus melaksanakan, tunduk dan taat pada Kode Etik Pustakawan Indonesia. Selain itu,

kode etik ini juga menjadi pedoman dan pegangan bagi semua pustakawan di Indonesia, baik pustakawan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun pegawai swasta (Non-PNS) yang bekerja di lembaga perpustakaan, dokumentasi dan informasi.

Dalam kode etik pustakawan Indonesia memiliki substansi yang dijabarkan dalam berbagai kewajiban yang dimiliki pustakawan, yaitu sikap dasar pustakawanan, hubungan dengan pengguna, hubungan antar-pustakawan, hubungan dengan perpustakaan, hubungan pustakawan dengan organisasi profesi, dan hubungan pustakawan dengan masyarakat

Kode Etik Pustakawan Indonesia terdiri dari beberapa bagian, antara lain sebagai berikut.

1. Mukadimah
2. Bab I berisi tentang ketentuan umum
3. Bab II berisi tentang tujuan
4. Bab III berisi tentang sikap dasar pustakawan, hubungan dengan pengguna, hubungan antar pustakawan, hubungan dengan perpustakaan, hubungan pustakawan dengan organisasi profesi, hubungan pustakawan dalam masyarakat, pelanggaran, pengawasan dan ketentuan lain.
5. Bab IV berisi penutup

Dalam penerapannya, kode etik diimplementasikan pada perilaku pustakawan dalam melakukan kegiatannya di perpustakaan. Jika pustakawan mengalami masalah terkait perbuatan etis dan profesi pustakawan, maka

hendaknya pustakawan kembali merujuk kepada kode etik pustakawan sebagai pedomannya. Kode etik merupakan kaidah umum sehingga kode etik perlu dijabarkan dan diimplementasikan dalam perilaku pustakawan dalam melaksanakan tugasnya. Menurut (Hermawan dan Zen, 2006: 123-149), kode etik diimplementasikan dalam berbagai kegiatan berikut.

a. Pergaulan di masyarakat

Di dalam masyarakat, pustakawan harus bersikap luwes dan tidak kaku. Pustakawan harus memiliki perilaku yang baik antara lain sopan santun, sabar dan tidak mudah marah, suka menolong, menghormati orang lain, penuh perhatian, tidak egois, memiliki sikap tenggang rasa, percaya diri, dan komunikatif.

b. Pelayanan kepada masyarakat

Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, pustakawan harus mengenal masyarakat pengguna, luwes dalam melayani, mengetahui kemauan pengguna, mempromosikan produk layanan, melayani sampai tuntas, tidak memaksakan kehendak, melayani dengan wajah ceria, menjamin kerahasiaan, mau mendengar keluhan, tidak berprasangka negatif, dan suka mengucapkan terima kasih.

c. Hubungan dengan rekan sejawat

Selain berhubungan baik dengan masyarakat pustakawan hendaknya menjaga dan memelihara hubungan baik dengan rekan sejawat sehingga akan tercipta suasana yang harmonis diantara pustakawan. Oleh karena itu,

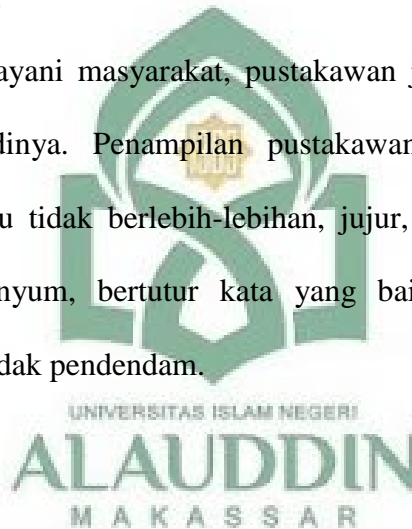
pustakawan perlu memperhatikan sikap mereka, antara lain tidak sombong, atau rendah diri, tidak suka menyakiti, serta mampu menempatkan diri.

d. Hubungan dengan atasan

Pustakawan hendaknya menciptakan hubungan yang baik juga dengan atasan. Untuk bekerja sama yang baik dengan atasan, pustakawan seharusnya loyal terhadap pekerjaannya dan lebih suka memberi solusi daripada masalah.

e. Penampilan pribadi

Dalam melayani masyarakat, pustakawan juga perlu memperhatikan penampilan pribadinya. Penampilan pustakawan yang diharapkan yaitu bersikap wajar atau tidak berlebih-lebihan, jujur, berpakaian sopan, tampil tenang, murah senyum, bertutur kata yang baik, pandai bergaul, tidak materialistis, dan tidak pendendam.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Berdasarkan hal tersebut terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan(Sugiyono, 2013: 3).

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nasir, 2005: 54). Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada (Mardalis, 1999: 26).

Prosedur penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan metode untuk mendapatkan kebenaran bukan hanya menyajikan data apa adanya melainkan juga berusaha menginterpretasikan korelasi sebagai faktor yang ada dan berlaku meliputi sudut pandang atau proses yang sedang berlangsung (Moleong, 2006: 79).

Dalam penelitian kualitatif juga tidak menggunakan istilah populasi tetapi lebih menggunakan situasi sosial yang terdiri dari 3 elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktifitas yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2009: 215).

Dari definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan wawancara untuk mendeskripsikan data yang penulis peroleh dari informan, untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang bagaimana penerapan kode etik pustakawan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar.

B. Lokasi dan Waktu penelitian

A. Lokasi penelitian : Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar

a. Sekilas Sejarah Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Perpustakaan Universitas Muslim Indonesia Makassar berdiri sejak didirikannya Universitas Muslim Indonesia Makassar yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta berada di Kordinator Kopertis Wilayah IX dan Kopertis Wilayah VIII, tepatnya tanggal 23 Juni 1954. Berlokasi di kampus I Jalan Kakatua No. 27 Ujung Pandang. Keberadaan Perpustakaan Universitas Muslim Indonesia Makassar sudah cukup lama, tetapi baru dikelola secara profesional dengan cara yang sangat sederhana semenjak tahun 1976. Pada tanggal 23 Juni 1990, bertepatan milad Universitas Muslim Indonesia Makassar yang ke -36, perpustakaan pusat pindah ke kampus liyang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo km. 05 Makassar,

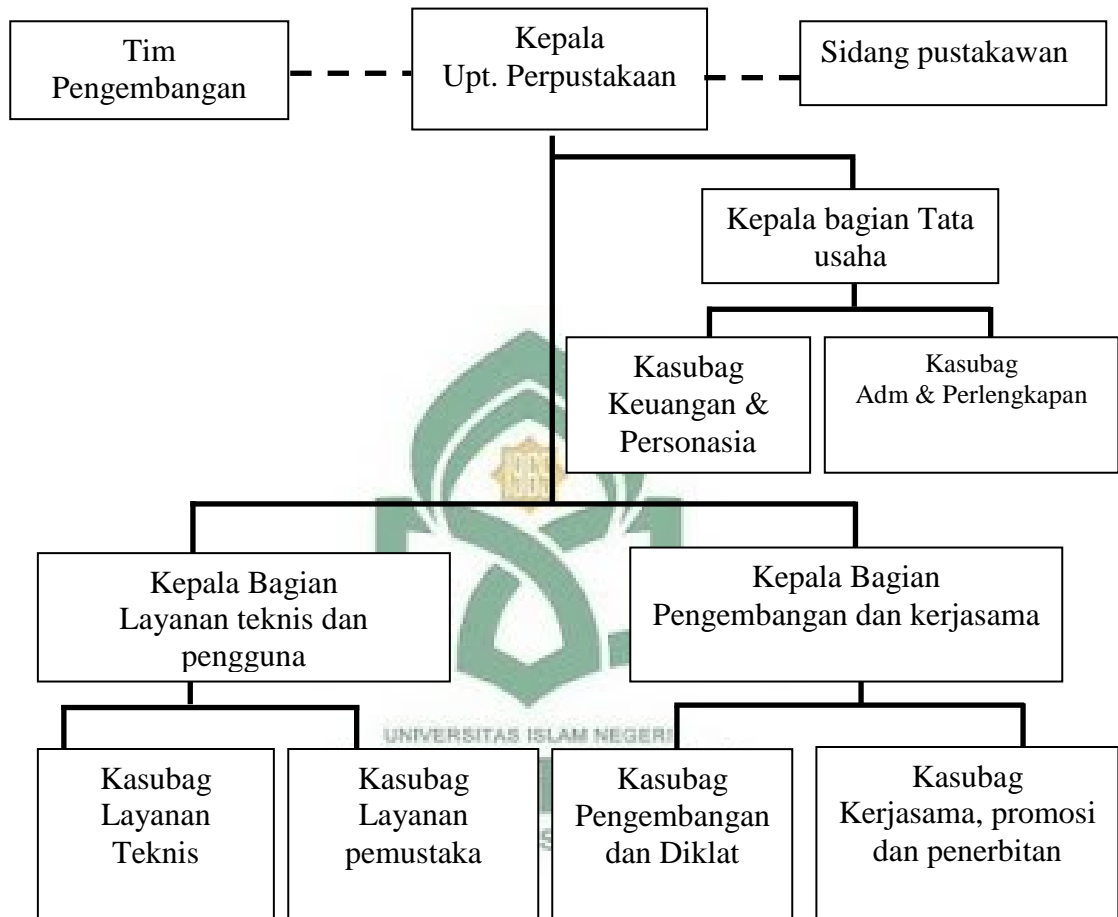
ditandai dengan diresmikannya gedung perpustakaan yang berlantai III oleh Bapak Direktur Perguruan Tinggi Swasta yaitu Prof. Dr. Yuhana Sukra, kemudian di beri nama “Perpustakaan Utsman bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar”. Pada tahun 1994 Perpustakaan Universitas Muslim Indonesia Makassar sudah menggunakan sistem Komputerisasi dengan program Sipisis. Pada tanggal 15 Desember 2014 beralih ke program SLIMS yang bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepada para pemustaka.

- b. Struktur Organisasi Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar

Adapun Struktur Organisasi yang dimiliki oleh Perpustakaan Universitas Muslim Indonesia Makassar dapat dilihat pada **Gambar 1** dibawah ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi Perpustakaan Universitas Muslim Indonesia Makassar



Catatan : ————— = Garis Komando

----- = Garis Koordinasi

c. Sumber Daya Manusia Pengelola Perpustakaan

Pejabat struktural pada Perpustakaan Usman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Tabel 1. Pejabat Struktural

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1	Dr.Ir.Abd. Karim Hadi, Msc	Kepala Perpustakaan	S.3
2	Drs. Surur Putuhena, MM	Kabag Tata Usaha	S.2
3	Drs.Thalha Achmad, MM	Kabag Pengembangan	S.2
4	H. La Mente, SE.,MM	Kabag Layanan Teknis	S.2
5	Nafisah Gulam, S.Sos	Kasubag Sirkulasi	S.1
6	Hasran, S.Sos	Kasubag Pengolahan	S.1
7	Zubir Marsuni, SP.MP	Kasubag Perlengkapan	S.2
8	Dra. Mazhati Kahar	Staf	S.1
9	Nurhafidah, BSc	Staf	D.3
10	Mustafa, ST	Staf	S.1
11	Fajeruddin Syakir, S.IP	Staf	S.1
12	Nurlinda, S.IP	Staf	S.1
13	Arvanita, S.IP	Staf	S.1
14	Lutfiah Abdul Kadir	Staf	SMA
15	Andriani, SE	Staf	S.1
16	Asnaeni, S, Hum., MM	Staf	S.2
17	Fhara, S.IP	Staf	S.1

18	Andi Arya Aryadillah, S.IP	Staf	S.1
19	Rosmini, S.IP	Staf	S.1
20	Wati	Staf	SMA
21	Saminah	Staf	SMA

d. Jenis Layanan Dan Fasilitas Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar

Sistem layanan yang diterapkan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar adalah sistem akses terbuka (*Open Access*), yaitu pemustaka langsung mencari dirak koleksi bahan pustaka yang digunakan.

1) Layanan Sirkulasi

Jasa ini memberikan layanan peminjaman dan pengembalian buku sesuai dengan peraturan yang berlaku (khusus untuk civitas akademika Universitas Muslim Indonesia Makassar). Pemustakan non Universitas Muslim Indonesia Makassar hanya diperbolehkan membaca dan photocopy ditempat.

2) Layanan Rujukan dan Referensi

Jasa layanan rujukan dan referensi memberikan rujukan informasi yang beragam dari bahan pustaka, yang ada di Perpustakaan Utsman Bin

Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar, seperti kamus, ensiklopedia, *handbook*, dan sebagainya.

3) Layanan Terbitan Berseri

Jasa layanan Surat Kabar, Majalah, Jurnal, dan hasil penelitian.

4) Layanan Skripsi, Tesis, Disertasi dan Tugas Akhir

Jasa layanan Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Tugas Akhir hanya boleh dibaca dan dicatat di perpustakaan.

5) Layanan Digital

Untuk mengimbangi ledakan informasi dan tuntutan pengguna data menelusuri informasi secara cepat dan tepat. Perpustakaan UMI Makassar membuka jasa layanan digital berupa Repository yang berisi informasi, local content yang disajikan dalam bentuk digital.

6) Layanan *Photocopy* dan Penjilidan

Untuk memudahkan pengguna perpustakaan mendapatkan informasi dari koleksi yang tidak dipinjamkan, kami menyediakan layanan photocopy dan penjilidan di lantai II Perpustakaan.

7) Layanan *Online Public Access Catalogue*

Data Bibliografi Perpustakaan Utsman Bin Affan UMI Makassar dapat diakses komputer yang khusus disediakan untuk pengunjung dengan menggunakan LAN dan *Web* Perpustakaan UMI.

8) Layanan Literasi Informasi

Melalui jasa ini pemustaka mendapatkan :

- a) Bimbingan menelusuri (mencari) informasi di perpustakaan secara cepat dan tepat serta bagaimana cara menggunakan fasilitas di Perpustakaan UMI
- b) Orientasi pengenalan perpustakaan dan gerakan cinta membaca (khusus MABA-UMI)

9) Layanan *Visitor*

Menerima dan melayani kunjungan siswa/mahasiswa, peserta diklat, Tim visitasi Prodi serta lembaga yang melakukan studi banding tentang aktivitas dan pengolahan di Perpustakaan UMI.

10) Layanan Magang

Membuka kesempatan bagi mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan, peserta Diklat atau pengelola perpustakaan untuk melaksanakan magang atau praktek kerja lapangan (PKL)

11) Layanan Diklat UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Membuka kesempatan bagi mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan dan pengelola perpustakaan untuk mengikuti Diklat Perpustakaan.

B. Waktu penelitian : 20 Juli – 20 Agustus 2016.

Tabel 2. Jadwal Proses Penelitian

[illegible]

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.

D. Metode Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2009: 225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Berikut ini akan di jelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Sugiyono (2010: 194), Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari

b. Metode Observasi

Metode Observasi (Pengamatan), yaitu penulisan secara langsung melihat dan mengadakan penyelidikan (pengamatan) pada tempat yang dijadikan tempat penelitian. Menurut Nawawi dan Martini (1992: 74), Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.

2. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat (instrumen) pengumpulan data utama karena peneliti adalah manusia dan hanya manusia yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, serta mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2013: 307). Suharsimi Arikunto (2002:

136), menyatakan bahwa instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka instrumen penelitian ini menggunakan panduan wawancara dan panduan dokumentasi.

E. Teknik Analisis dan Pengolahan Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong (2004: 280-281), “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992: 15-19), adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada

waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.

3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.



BAB IV

HASIL & PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penerapan Kode Etik Pustakawan Di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar

Data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap dua orang informan yang merupakan pustakawan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar yaitu Bapak Thalha Achmad dan Ibu Nurlinda. Data penelitian digunakan untuk menjawab masalah penelitian menyangkut penerapan kode etik pustakawan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar terfokus pada bagian pelayanan sirkulasi dan kendala yang di hadapi pustakawan dalam menerapkan kode etik pustakawan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar.

1. Pemahaman Pustakawan terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia

Dalam AD/ART dan Kode Etik Pustakawan Indonesia dari Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dijelaskan bahwa kode etik pustakawan merupakan aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan; etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap pustakawan; ketentuan mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri sendiri,

sesama pustakawan, pengguna, masyarakat dan negara. Untuk mengetahui definisi kode etik dari para informan peneliti menanyakan definisi kode etik menurut konsep masing-masing informan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pengembangan Perpustakaan dan IT bapak Drs. Thalha Achmad, MM menyatakan bahwa :

“Kode etik adalah kesepakatan tertulis yang dibuat oleh komunitas pustakawan itu sendiri yang berisi aturan main dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan” (Informan I, 5 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan dibagian sirkulasi ibu Nurlinda S. IP menyatakan bahwa:

“Kode etik sebagai aturan bagaimana sebuah profesi seharusnya menjalankan tugas profesinya dengan baik” (Informan II, 8 Agustus 2016).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kode etik adalah kesepakatan tertulis yang dibuat oleh komunitas pustakawan itu sendiri yang berisi aturan main dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan. Kode etik sebagai aturan bagaimana sebuah profesi seharusnya menjalankan tugas profesinya dengan baik.

2. Sikap Dasar Pustakawan

Kewajiban pustakawan dalam hal ini terdapat dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia Bab III pasal 3 tentang Sikap Dasar Pustakawan. Sikap dasar berkaitan erat dengan karakter diri yang dimiliki oleh seorang

pustakawan. Karakter ini akan menentukan bagaimana sikap pustakawan dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam melayani masyarakat sebagai pengguna perpustakaan. Sikap dasar ini juga berkaitan dengan moral, artinya kewajiban yang dilakukan oleh pustakawan berasal dari dirinya sendiri, bukan hanya karena tuntutan profesi. Dalam pasal ini disebutkan enam kewajiban pustakawan yang dapat dijadikan pedoman dalam tingkah lakunya. Sikap dasar penting untuk dilaksanakan oleh pustakawan sebagai bentuk penerapan diri. Sikap dasar pustakawan memiliki beberapa hal sebagai berikut:

- a. Berupaya melaksanakan tugas sesuai harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya.

Tugas pustakawan adalah melayani pemustaka dengan baik. Maka dalam kode etik ini, pustakawan dituntut untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat pemustaka untuk kemudian memberikan layanan sesuai dengan harapan pemustakanya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pengembangan Perpustakaan dan IT bapak Drs. Thalha Achmad, MM menyatakan bahwa:

“Berupaya melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugasnya, terutama yang berkaitan dengan hubungan masyarakat. Berusaha membentuk citra perpustakaan di mata pengguna sehingga sangat fokus dalam upaya untuk merespon semua keluhan dari pengguna” (Informan I, 5 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan dibagian sirkulasi ibu Nurlinda S. IP menyatakan bahwa:

“Berupaya memenuhi kebutuhan pengguna dengan memberikan pelayanan terbaik dalam hal sirkulasi. Membantu pengguna dalam mencari koleksi yang dibutuhkannya” (Informan II, 8 Agustus 2016).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa masing-masing pustakawan berusaha untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam memenuhi kebutuhan pengguna.

- b. Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan.

Pustakawan adalah seorang yang telah memiliki ilmu dibidang perpustakaan artinya, ia memiliki dibidang perpustakaan yang harus senantiasa ditingkatkan dan dikembangkan. Untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan keahliannya, dapat dilakukan dengan cara selalu mengikuti perkembangan dunia kepustakawanan dan tidak berhenti untuk menuntut ilmu terutama bidang kepustakawanan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pengembangan Perpustakaan dan IT bapak Drs. Thalha Achmad, MM menyatakan bahwa:

“Mengikuti perkembangan dunia kepustakawanan dan tidak berhenti untuk menuntut ilmu terutama bidang kepustakawanan” (Informan I, 5 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan dibagian sirkulasi ibu Nurlinda S. IP menyatakan bahwa:

“Adanya kegiatan baca tulis di kalangan pustakawan, mengikuti pelatihan dan seminar” (Nurlinda, 8 Agustus 2016).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa upaya pustakawan dalam mempertahankan keunggulan kompetensi yang dimilikinya dengan mengikuti perkembangan dunia kepastakawanan dan tidak berhenti untuk menuntut ilmu terutama bidang kepastakawanan. Adanya kegiatan baca tulis di kalangan pustakawan, mengikuti pelatihan dan seminar

- c. Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi.

Selain memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sebagai seorang profesional, pustakawan juga memiliki kewajiban sebagai seorang individu, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sekalipun terdapat konflik diri sebagai individu, namun tetap dituntut untuk bersikap profesional.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pengembangan Perpustakaan dan IT bapak Drs. Thalha Achmad, MM menyatakan bahwa:

“Harus bersikap profesional dengan mengedepankan kepentingan profesi diatas kepentingan pribadi” (Informan I, 5 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan dibagian sirkulasi ibu Nurlinda S.IP menyatakan bahwa:

“Memisahkan antara masalah pribadi dengan masalah pekerjaan” (Informan II, 8 Agustus 2016).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa upaya pustakawan dalam membedakan antara pandangan atau sikap pribadi dengan tugas profesi harus bersikap profesional dengan mengedepankan kepentingan profesi diatas kepentingan pribadi. Memisahkan antara masalah pribadi dengan masalah pekerjaan.

- d. Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan pertimbangan profesional.

Sudah menjadi suatu yang diwajibkan bahwa dalam memutuskan segala tindakannya, pustakawan harus mampu bersikap profesional. Keputusan yang iya ambil dan lakukan demi kepentingan pengguna, bukan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pengembangan Perpustakaan dan IT bapak Drs. Thalha Achmad, MM menyatakan bahwa:

“Melakukan pekerjaan sesuai dengan taat aturan, bekerja dengan tepat waktu dan bersungguh-sungguh” (Informan I, 5 Agustus 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan dibagian sirkulasi ibu Nurlinda S. IP menyatakan bahwa:

“Bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakan dan tidak memandanga ras, agaman, status sosial dan lain sebagainya antar pengunjung yang berkunjung” (Informan II, 8 Agustus 2016)

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pustakawan telah bersikap profesional dalam pengambilan keputusan untuk kemudian diwujudkan dalam tindakannya. Mereka Melakukan pekerjaan sesuai dengan taat

aturan, bekerja dengan tepat waktu dan bersungguh-sungguh, Bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakan dan tidak memandanga ras, agaman, status sosial dan lain sebagainya antar pengunjung yang berkunjung.

- e. Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi

Dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pustakawan, ia harus bekerja dengan bersih dan jujur. Pustakawan tidak boleh menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadinya. Misalnya tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pengembangan Perpustakaan dan IT bapak Drs. Thalha Achmad, MM menyatakan bahwa:

“Pernah menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadinya, terutama komputer dan internet untuk membuka email atau sekedar mengetik sesuatu” (Informan I, 5 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan dibagian sirkulasi ibu Nurlinda S. IP menyatakan bahwa:

“Pernah memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadinya. Misalnya masih menggunakan komputer kantor pada saat jam santai untuk bermain game” (Informan II, 8 Agustus 2016).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa penggunaan fasilitas kantor tidak lepas dari kepentingan pribadi. Akan tetapi, tetap berusaha untuk menghindarkan diri memanfaatkan fasilitas kantor.

- f. Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan.

Pustakawan adalah bagian dari masyarakat, sekaligus sebagai abdi masyarakat dalam hal pelayanan informasi. Kaitannya dengan pelayanan ini, kode etik menghendaki agar pustakawan bersikap sopan dan bijaksana kepada pemustaka yang berinteraksi dengannya. Dalam melayani pengguna, pustakawan harus bersikap sopan dan bijaksana, sopan dapat dilakukan misalnya dengan senyum dan salam kepada pemustaka. Sopan berjalan beriringan dengan bijaksana, sehingga diharapkan perilaku pustakawan dapat memuaskan pemustaka perpustakaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pengembangan Perpustakaan dan IT bapak Drs. Thalha Achmad, MM menyatakan bahwa:

“Selalu bersikap sopan dan bijaksana dalam melayani pemustaka baik dalam ucapan maupun perbuatan karena setiap pekerjaan yang dilaksanakannya tidak lepas dari interaksi orang lain” (Informan I, 5 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan dibagian sirkulasi ibu Nurlinda S. IP menyatakan bahwa:

“Untuk menjaga martabat dan profesinya pustakawan harus bersikap sopan dan bijaksana dalam melayani pemustaka” (Informan II, 8 Agustus 2016).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pustakawan selalu bersikap sopan dan bijaksana dalam melayani pemustaka baik dalam

ucapan maupun perbuatan karena setiap pekerjaan yang dilaksanakannya tidak lepas dari interaksi orang lain. Untuk menjaga martabat dan profesinya pustakawan harus bersikap sopan dan bijaksana dalam melayani pemustaka.

3. Hubungan dengan Pemustaka

Kewajiban pustakawan menyangkut hubungannya dengan pemustaka terdapat dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia Bab III pasal 4. Ada empat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pustakawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain sebagai berikut.

- a. Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa pandang ras, agama, status social, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Hak perorangan atas informasi bermakna sebagai hak pemustaka mendapatkan informasi yang seluas-luasnya, dan kemudian menjadi tugas pustakawan untuk dapat memberikan pelayanan kepada pemustaka dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pengembangan Perpustakaan dan IT bapak Drs. Thalha Achmad, MM menyatakan bahwa:

“Pustakawan sebagai seorang profesional mempunyai kewajiban untuk memperluas akses dan menyebarkan informasi seluas-luasnya kepada pemustaka” (Informan I, 5 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan dibagian sirkulasi ibu Nurlinda S. IP menyatakan bahwa:

“Pustakawan menyediakan akses tak terbatas bahkan pustakawan bersedia mecarikan informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka” (Informan II, 8 Agustus 2016).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam memberikan layanan tiadak ada sikap membeda-bedakan dalam hal apapun, tetap memberikan layanan yang prima. Pustakawan sebagai seorang profesional mempunyai kewajiban untuk memperluas akses dan menyebarkan informasi sesuai kebutuhan pemustaka.

- b. Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna informasi yang diperoleh diperpustakaan.

Tugas seorang pustakawan adalah menyediakan informasi kepada pemustaka, sedangkan pustakawan tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan informasi tersebut. Jika terjadi penyalahgunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan oleh pemustaka, hal tersebut sudah berada di luar kendali pustakawan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pengembangan Perpustakaan dan IT bapak Drs. Thalha Achmad, MM menyatakan bahwa:

“Penggunaan informasi sudah berada di luar tanggung jawab pustakawan. Pustakawan hanya membuka informasi, jika disalahgunakan oleh pemustaka, hal tersebut bukan tanggung jawab pustakawan lagi” (Informan I, 5 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan dibagian sirkulasi ibu Nurlinda S. IP menyatakan bahwa:

“Pustakawan hanya menyediakan informasi. Masalah penyalahgunaan informasi, itu bukan menjadi tanggung jawab pustakawan lagi” (Informan II, 8 Agustus 2016).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pustakawan sudah mengetahui bahwa tugas mereka hanya menyediakan informasi. Untuk penggunaan informasi oleh pemustaka tidak lagi menjadi tanggung jawab pustakawan.

- c. Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari.

Tugas pustakawan untuk melindungi kerahasiaan dan privasi pengguna, baik berupa informasi yang dicari maupun data pengguna itu sendiri, dengan melaksanakan kewajiban ini pustakawan akan mendapat kepercayaan masyarakat karena kerahasiaan dan privasi mereka terjamin.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pengembangan Perpustakaan dan IT bapak Drs. Thalha Achmad, MM menyatakan bahwa:

“Apapun bentuknya, baik itu data pemustaka maupun kerahasiaan informasi yang dicari pemustaka, pustakawan tidak boleh menyebarluaskannya” (Informan I, 5 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan dibagian sirkulasi ibu Nurlinda S. IP menyatakan bahwa:

“Selama data yang diminta bukan berupa data ponsel pemustaka, misalnya nomor telepon dan alamat rumah, maka saya akan memberikan data tersebut kepada pihak yang membutuhkannya” (Informan II, 8 Agustus 2016).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak semua pustakawan memahami pengertian privasi dan kerahasiaan pemustaka. Apapun bentuk dari privasi dan rahasia informasi yang dicari pemustaka, pustakawan memiliki kewajiban untuk melindunginya dari pihak-pihak yang tidak berwenang.

4. Hubungan Antar Pustakawan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, terdapat hubungan antar sesama pustakawan. Kewajiban yang mengatur hubungan antar pustakawan ini telah disebutkan dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia Bab III pasal 5 yang dijabarkan menjadi 5 kewajiban pustakawan. Kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut.

- a. Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.

Kode etik pustakawan mewajibkan agar pustakawan dapat mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Untuk memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya membaca buku-buku, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mengikuti seminar, pelatihan, workshop, dan

sebagainya. Kewajiban ini bertujuan agar pustakawan dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pengembangan Perpustakaan dan IT bapak Drs. Thalha Achmad, MM menyatakan bahwa:

“Mengikuti semua jenis pelatihan, seminar, workshop dan sebagainya yang diselenggarakan oleh perpustakaan” (Informan I, 5 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan dibagian sirkulasi ibu Nurlinda S. IP menyatakan bahwa:

“Mengikuti berbagai pelatihan yang terkait dengan kompetensi kepustakawanannya” (Informan II, 8 Agustus 2016).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pustakawan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar selalu berusaha untuk memelihara dan mengembangkan keterampilannya dengan mengikuti semua kegiatan pengembangan diri berupa seminar, workshop, dan lain sebagainya yang diadakan oleh perpustakaan.

- b. Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi professional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok.

Dalam mengembangkan kompetensi pustakawan profesional, pustakawan perlu melakukan kerjasama dengan pustakawan lain, dengan adanya kerjasama dengan sesama pustakawan bukan hanya dapat mengembangkan diri sendiri tetapi dapat bersama-sama maju dan berkembang dengan pustakawan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pengembangan Perpustakaan dan IT bapak Drs. Thalha Achmad, MM menyatakan bahwa:

“Dengan mengikuti kegiatan seperti menghadiri seminar, pelatihan-pelatihan, membaca buku dan membaca di internet dilakukan dalam mengembangkan kompetensi diri dalam bidang kepustakawanan” (Informan I, 5 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan dibagian sirkulasi ibu Nurlinda S.IP menyatakan bahwa:

“Saling memotivasi dan saling membantu menyelesaikan pekerjaan” (Informan II, 8 Agustus 2016).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pustakawan bekerja sama untuk mengembangkan kompetensi di bidang kepustakawanan dengan cara saling memotivasi, saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan, dan mengikuti kegiatan seperti menghadiri seminar, pelatihan-pelatihan, membaca buku dan membaca di internet dilakukan dalam mengembangkan kompetensi diri dalam bidang kepustakawanan .

- c. Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antar sesama rekan.

Dalam menjalankan kewajiban ini, pustakawan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, seperti saling menghormati, saling menghargai, pengertian, dan sebagainya. Pustakawan juga harus menyadari kepentingan bersama, artinya tidak egois atau mementingkan diri sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pengembangan Perpustakaan dan IT bapak Drs. Thalha Achmad, MM menyatakan bahwa:

“Pustakawan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, seperti saling menghormati, saling menghargai dan pengertian” (Informan I, 5 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan dibagian sirkulasi ibu Nurlinda S. IP menyatakan bahwa:

“Pustakawan menjalin hubungan baik dengan rekan kerjanya dengan cara saling mengingatkan, saling menghargai, saling menghormati dan saling mengapresiasi” (Informan II, 8 Agustus 2016).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pustakawan menjalin hubungan baik dengan rekan kerjanya dengan saling mengingatkan, saling menghargai, saling menghormati, dan tidak mementingkan diri sendiri. Dengan terciptanya hubungan yang baik antar sesama pustakawan dapat meningkatkan kinerja pustakawan karena mereka merasa memiliki rekan kerja ketika bekerja yang akan membantunya ketika mengalami kesulitan.

- d. Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik didalam maupun diluar kedinasan.

Profesi pustakawan dijalankan secara bersama-sama dengan rekan kerja pustakawan lain. Dalam menjalankan profesinya, kadang muncul konflik antara sesama pustakawan. Oleh karena itu, kode etik pustakawan ini mengatur pustakawan untuk menjaga nama baik dan martabat rekan dengan tidak membawa masalah yang terjadi ke luar, misalnya

menceritakannya ke orang lain di luar kantor. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga nama baik pustakawan dan lembaga perpustakaan di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pengembangan Perpustakaan dan IT bapak Drs. Thalha Achmad, MM menyatakan bahwa:

“Dengan tidak membawa masalah yang terjadi ke luar, misalnya menceritakannya ke orang lain di luar kantor. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga nama baik pustakawan dan lembaga di masyarakat” (Informan I, 5 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan dibagian sirkulasi ibu Nurlinda S. IP menyatakan bahwa:

“Pustakawan selalu menjaga privasi rekan kerja, tidak menjelek-jelekkan rekan kerja, melakukan komunikasi yang baik sehingga tidak ada salah paham” (Informan II, 8 Agustus 2016).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa upaya pustakawan dalam menjaga nama baik atau martabat rekan kerjanya adalah dengan cara seorang pustakawan tidak membawa masalah yang terjadi ke luar kantor dan tidak mencertikannya kepada orang lain dan selalu melakukan komunikasi antar sesama rekan kerja sehingga tidak terjadi kesalah pahaman.

5. Hubungan dengan Masyarakat.

Pengguna perpustakaan merupakan bagian dari masyarakat pada umumnya. Selain di perpustakaan, kemampuan pustakawan dapat digunakan untuk membantu masyarakat secara luas. Hubungan antara pustakawan dengan masyarakat ini telah diatur dalam Kode Etik Pustakawan Bab III pasal 8.

- a. Perpustakaan bekerja sama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya.

Masyarakat pengguna perpustakaan terdiri dari berbagai pengguna dari komunitas atau organisasi sehingga pustakawan harus bekerja sama dengan mereka dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pengembangan Perpustakaan dan IT bapak Drs. Thalha Achmad, MM menyatakan bahwa:

“Melakukan kerjasama dengan Perpustakaan Universitas Hasanuddin Makassar, bekerjasama dalam melakukan pengadaan yang melibatkan banyak instansi lain dalam pendidikan pemakai” (Informan I, 5 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan dibagian sirkulasi ibu Nurlinda S. IP menyatakan bahwa:

“Pustakawan berusaha untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan dengan mengadakan kegiatan pengembangan, memotivasi, dan mengajak masyarakat untuk gemar membaca” (Informan II, 8 Agustus 2016).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pustakawan sudah ikut aktif dalam komunitas atau organisasi masyarakat lain. Pustakawan juga berusaha untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan dengan mengadakan kegiatan pengembangan, memotivasi, dan mengajak masyarakat untuk gemar membaca. Pustakawan sudah melakukan kerjasama dengan organisasi lain.

- b. Perpustakaan berupaya memberikan sumbangan dalam perkembangan kebudayaan di masyarakat.

Kewajiban ini memberikan pemahaman kepada pustakawan bahwa pustakawan mempunyai peran untuk melestarikan kebudayaan dalam masyarakat. Pustakawan harus memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya sebagai seorang pustakawan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pengembangan Perpustakaan dan IT bapak Drs. Thalha Achmad, MM menyatakan bahwa:

“Pustakawan harus memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dimilikinya sebagai seorang pustakawan” (Informan I, 5 Agustus 2016).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pustakawan dibagian sirkulasi ibu Nurlinda S. IP menyatakan bahwa:

“Pustakawan telah melakukan berbagai kegiatan atas sumbangsih yang diberikan kepada masyarakat. Sumbangsiah tersebut sesuai dengan ilmunya, yaitu perpustakaan Dengan pengabdian masyarakat yang berisi mengenai materi seluruh pekerjaan yang dilakukan dalam pengembangan perpustakaan seperti pengadaan, pelestarian dan lain sebagainya. Menghadiri lokakarya, bimtek dan kegiatan lainnya” (Informan II, 8 Agustus 2016).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pustakawan harus memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan dan pengabdian masyarakat yang berisi mengenai materi seluruh pekerjaan yang dilakukan dalam pengembangan

perpustakaan seperti pengadaan, pelestarian dan lain sebagainya. Menghadiri lokakarya, bimtek dan kegiatan lainnya semua sumbangsih itu dilakukan setiap tahunnya.

B. Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Kode Etik Pustakawan Di Perpustakaan Utsman bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar

Kode etik merupakan aturan, rambu-rambu yang dapat dijadikan sebagai pedoman tingkah laku pustakawan pada saat melakukan tindakan dalam bekerja. Dalam hal ini mengisyaratkan bahwa kode etik tidak dengan mudah dapat diterapkan tanpa mengalami suatu kendala dan setiap kendala pasti terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau mengurangi dari kendala tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Informan I dan Informan II, tersirat beberapa kendala dalam penerapan kode etik pustakawan.

Kendala yang dihadapi pustakawan dalam menerapkan kode etik pustakawan di Perpustakaan Utsman bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar diantaranya adalah.

a. Pegawai perpustakaan tidak semua memiliki pendidikan perpustakaan

Dalam dunia perpustakaan, pendidikan menjadi unsur penting bagi jenjang karir seseorang. Selain itu, tingkat pendidikan juga menjadi penting untuk menentukan tingkat pemahaman seseorang terhadap sesuatu hal. Dengan tidak meratanya jenjang pendidikan sehingga pemahaman dan sikap pustakawan cenderung semauanya, tidak berdasarkan sikap yang profesional.

Tidak meratanya jenjang pendidikan yang ditempuh oleh pustakawan menjadi kendala dalam pelaksanaan kode etik terkait dengan pemahaman dan penyiapannya terhadap kewajiban yang tuangkan dalam Kode Etik Pustakawan. Pustakawan Perpustakaan Universitas Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar tidak semua memiliki pendidikan perpustakaan, pustakawan hanya tamatan SMA yang diangkat sebagai pustakawan setelah 3 tahun bekerja di perpustakaan, sehingga pustakawan kurang mengetahui kode etik dan kewajiban-kewajiban pustakawan.

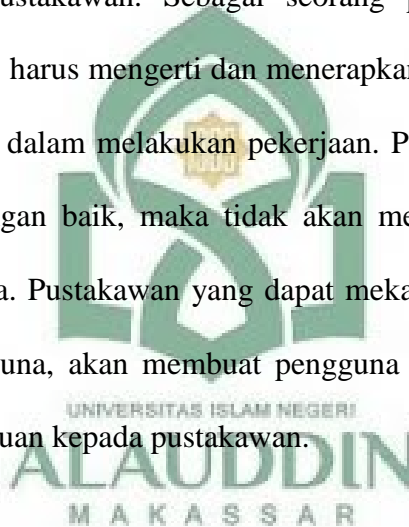
b. Tidak semua pustakawan mengetahui dan memahami kode etik pustakawan

Kode etik pustakawan adalah aturan yang dibuat dan diterbitkan secara tertulis, artinya untuk memahami lebih jauh dan mengerti secara tuntas, pustakawan harus membaca terlebih dahulu kode etik pustakawan. Kurangnya pengetahuan pustakawan mengenai sikap dasar pustakawan dan tidak mengetahui kode etik sebagai seorang pustakawan yang profesional dikarenakan pustakawan malas untuk membaca dan memahami kode etik pustakawan tersebut dengan tuntas. Pustakawan hanya sekedar mengetahui kode etik tersebut, tanpa menerapkan kode etik pustakawan dalam bekerja. Sebagai pustakawan yang profesional, pustakawan harus memiliki pengetahuan mengenai kode etik pustakawan dan menerapkannya dalam dunia pekerjaan. Pustakawan yang tidak mengetahui kode etik pustakawan akan kesulitan dalam melakukan pekerjaan, sebab pustakawan adalah sebagai

penyebar informasi yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu pustakawan harus memiliki pemahaman mengenai kode etik pustakawan.

c. Kurangnya bakat pustakawan dalam berkomunikasi

Kurangnya bakat pustakawan dalam berkomunikasi dapat berpengaruh dalam melakukan interaksi kepada pengunjung. Berkomunikasi yang baik akan membuat pengunjung akan merasa senang dan terbantu saat ingin meminta bantuan kepada pustakawan. Sebagai seorang pustakawan yang bekerja dibidang informasi, harus mengerti dan menerapkan cara berkomunikasi yang baik, sopan, ramah dalam melakukan pekerjaan. Pada saat pustakawan dapat berkomunikasi dengan baik, maka tidak akan menimbulkan suatu masalah dalam pekerjaannya. Pustakawan yang dapat melakukan komunikasi dengan baik kepada pengguna, akan membuat pengguna merasa nyaman pada saat ingin meminta bantuan kepada pustakawan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya tentang penerapan Kode Etik Pustakawan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penerapan Kode Etik Pustakawan informan atau pustakawan Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar sudah menerapkan sikap dasar pustakawan dalam hal hubungan dengan pemustaka, hubungan antar pustakawan dan hubungan dengan masyarakat, tetapi masih banyak pustakawan yang hanya mengetahui kode etik pustakawan tanpa menerapkan kode etik tersebut. Dalam melakukan penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar
2. Kendala yang dihadapi pustakawan dalam penerapan kode etik pustakawan khususnya pada bagian sirkulasi yaitu tidak meratanya jenjang pendidikan perpustakaan, kurangnya pengetahuan pustakawan mengenai sikap dasar pustakawan dan tidak mengetahui kode etik sebagai seorang pustakawan yang profesional, kurangnya bakat pustakawan dalam berkomunikasi dan bergaul, sehingga pustakawan bersikap tidak ramah dalam melayani.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian ini, penulis banyak melihat adanya hal yang menarik dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan saran berdasarkan penelitian ini:

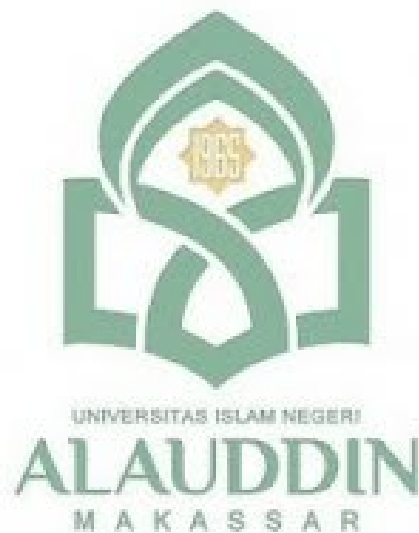
1. Disarankan pustakawan di Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar, khususnya para responden mampu lebih meningkatkan pemahaman tentang Kode Etik Pustakawan .
2. Disarankan pustakawan Perpustakaan Perpustakaan Utsman Bin Affan Universitas Muslim Indonesia Makassar dapat menerapkan kode etik pustakawan sebagai pedoman standar tingkah laku sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dan citra pustakawan di masyarakat.
3. Disarankan pustakawan lebih giat menggali lebih dalam Kode Etik Pustakawan sehingga pustakawan dapat mengetahui hak kewajiban serta tanggung jawan yang harus ditaati oleh pustakawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Lukman dkk. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Arikunto, Suharsini. 2003. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineke Cipta
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Basuki, Sulistyo. 1991. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Utama
- Departemen Agama RI. 1989. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra.
- Ernawan, Erna. 2007. *Bussiness Ethics*. Bandung: Alfabeta
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM
- Hasan, M.Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Thalia Indonesia
- Hasugian, Jonner. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. Medan: USU Press
- Hermawan, Rachman dan Zulfikar Zen. 2006. *Etika Kepustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Profesi dan Kode Etik Pustakawan Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto
- Ikbali, Amir. 2014. *Penerapan Kode Etik Pustakawan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. Makassar. Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi. 2000. *Terjemah Tafsir Jalalain*. Bandung : Sinar Baru Algensindo
- Lasa, HS. 2009. *Kamus Kepustakawanan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mathar, Muh. Quraisy. 2012. *Modul manajemen dan Organisasi Perpustakaan*. Makassar: Alauddin University

- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI
- Moleong, Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- _____. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muin, Muh. Aswar. 2014. *Information Literacy Skills strategi Penelusuran Informasi Online*. Makassar: Alauddin University
- Nasir. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Perpustakaan Nasional. 2010. *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*, Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Risno, Mbonuong. 2013. “Implementasi Kode Etik Pustakawan dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Pustakawan di Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara”. *Journal Volume II. No. 4 Tahun 2013*
- Salam, Burhanudin. 1997. *Etika Sosial Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*. Jakarta: Rineke Cipta
- Simorangkir, O.P. 2003. *Etika : Bisnis, Jabatan, dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyono. 2005. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2010. *Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta
- _____. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Suwarno, Wiji. 2010. *Pengetahuan Dasar Kepustakaan*. Bogor: Ghalia Indonesia

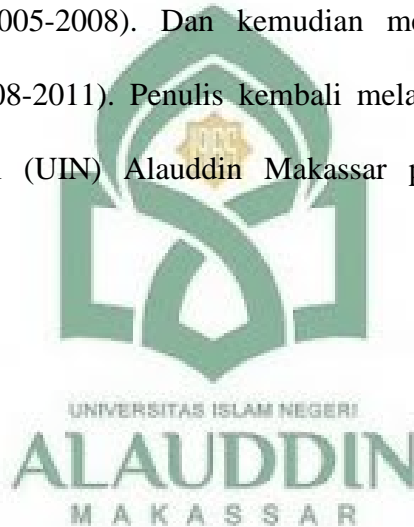
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*. Makassar: Alauddin University



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Irfan Pramadi Faryd, lahir di Ujung Pandang, 01 April 1993. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Ir. Faryd Sjahrullah dengan Ibu Fatmah Djumriah. Memulai pendidikannya di SDN 4 Makasar (1999-2005), kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 8 Makassar (2005-2008). Dan kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 10 Makassar (2008-2011). Penulis kembali melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada Fakultas Adab dan Humaniora.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Kampus I Jl. Sultan Alauddin No.63 Makassar Telp. 0411 - 864923 (Kampus I)
Kampus II Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong-Gowa Telp. (0411) 841879 Fax. (0411) 8221400
Email: fak.adabhumaniora@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 101 TAHUN 2016

Tentang

**PEMBIMBING / PEMBANTU PEMBIMBING PENELITIAN
DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN ALAUDDIN MAKASSAR :

Membaca : Surat permohonan Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin :
Nama : **IRFAN PRAMADI FARYD** NIM : 40400111157
Tanggal : 26 Januari 2016 untuk mendapatkan pembimbing Skripsi dengan
Judul :

**PENERAPAN KODE ETIK PUSTAKAWAN PADA PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS FAJAR MAKASSAR**

Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing.
2. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai pembimbing penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
4. Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 403 Tahun 1998 tentang Kurikulum IAIN Alauddin;
5. Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin;
6. Surat Keputusan Rektor IAIN Alauddin Makassar Nomor 42 Tahun 1993 tentang Penulisan dan Ujian Skripsi / Munaqasyah pada IAIN Alauddin;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 326.C Tahun 2014 tentang Kalender Kegiatan Akademik UIN Alauddin Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat / menunjuk Saudara :
1. **Sitti Husaebah Pattah.S.Ag,S.S.,M.Hum.**
2. **Drs. M. Jayadi., M.Ag.**
- Kedua : Tugas Dosen Pembimbing adalah memberi bimbingan dalam segi-segi metodologi dan teknik penulisan sampai selesai dan Mahasiswa tersebut lulus Ujian.
- Ketiga : Biaya pembimbing/pembantu Skripsi dibebankan kepada Anggaran Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin sesuai persetujuan Rektor UIN Alauddin Makassar.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samata
Pada Tanggal 28 Januari 2016



Dekan,

[Signature]
Dr.H.Barsihannor.,M.Ag
NIP. 19691012 199603 1 003

Tembusan :

1. *Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan);*
2. *Mahasiswa yang bersangkutan.*

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 609 Tahun 2016
TENTANG
PANITIA DAN PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN ALAUDDIN MAKASSAR :

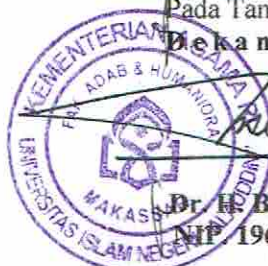
- Membaca : Surat permohonan Saudara : **IRFAN PRAMADI FARYD**
Mahasiswa Jurusan/ Nim : Ilmu Perpustakaan / 40400111157
Fak. Adab UIN Alauddin Tanggal : 23 Juni 2016
Perihal : Permohonan seminar proposal yang berjudul :
PENERAPAN KODE ETIK PUSTAKAWAN PADA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS FAJAR MAKASSAR
- Menimbang : a. Bahwa Saudara yang tersebut namanya di atas telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan seminar proposal.
b. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu membentuk panitia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
4. Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 403 Tahun 1998 tentang Kurikulum IAIN Alauddin;
5. Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin;
6. Surat Keputusan Rektor IAIN Alauddin Makassar Nomor 42 Tahun 1993 tentang Penulisan dan Ujian Skripsi / Munaqasyah pada IAIN Alauddin;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 326.C Tahun 2014 tentang Kalender Kegiatan Akademik UIN Alauddin Makassar Tahun 2015.
8. Surat Keputusan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar No. 028 Tahun 2011 tentang Mekanisme Penyelesaian Skripsi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia seminar proposal Saudara tersebut di atas dengan komposisi dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Panitia bertugas melaksanakan seminar proposal sampai selesai dan memberi laporan kepada fakultas.
3. Seminar proposal dilaksanakan pada hari/tanggal : **Rabu, 13 Juli 2016, Jam 13.30 s.d 15.30 Wita, Ruang Senat.**
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samata
Pada Tanggal 29 Juni 2016



Dr. H. Barsihannor, M.Ag.
NIP. 19691012 199603 1 003

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TANGGAL : 23 Juni 2016
NOMOR : 609 TAHUN 2016

TENTANG

**PANITIA DAN PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Ketua : Dr. Abd. Rahman. R., M.Ag.
Sekretaris : Dra. Laely Yuliani Said., M.Pd.
Munaqisy I : Hildawati Almah. S.Ag. S.S., M.Hum.
Munaqisy II : Marni. S.IP., M.IP.
Konsultan I : St. Husebah Pattah. S.Ag. S.S., M.Hum.
Konsultan II : Drs. M. Jayadi., M.Ag.
Pelaksana : Ir. Makmur Jaya., MT.

Samata, 29 Juni 2016



Dr. H. Barsihannor, M.Ag.
NIP. 19691012 199603 1 003

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 642 Tahun 2016

Tentang

PANITIA PELAKSANA UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN ALAUDDIN MAKASSAR :

- Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif Saudara : **IRFAN PRAMADI FARYD**
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
4. Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 403 Tahun 1998 tentang Kurikulum IAIN Alauddin;
5. Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
6. Surat Keputusan Rektor IAIN Alauddin Makassar Nomor 42 Tahun 1993 tentang Penulisan dan Ujian Skripsi/Munaqasyah pada IAIN Alauddin.
7. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 326.C Tahun 2014 tentang Kalender Kegiatan Akademik UIN Alauddin Makassar Tahun 2015.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Pelaksana Ujian Komprehensif Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar dengan komposisi dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian komprehensif bagi Saudara yang namanya tersebut di atas;
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin;
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya;
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samata
Pada Tanggal 26 Juli 2016

Dekan,


Dr. H. Barsihannor, M. Ag.
NIP. 19691012 199603 1 003



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TANGGAL : 26 JULI 2016
NOMOR : 642 TAHUN 2016

T E N T A N G

**KOMPOSISI / PERSONALIA
PANITIA PELAKSANA UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nama : **IRFAN PRAMADI FARYD**

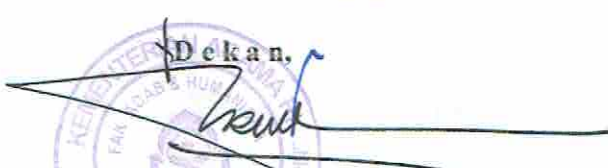
NIM : 40400111157

Jurusan : Ilmu Perpustakaan

No.	Hari/Tgl.	Mata Ujian	Tim Penguji
1.	Jum'at 29 Juli 2016	Dirasah Islamiyah	Ketua : Himayah, S.Ag., S.S., MIMS. Sekretaris : Drs. Nasruddin, MM. Penguji : Dr. Hj. Gustia Tahir, M.Ag. Pelaksana : Niswa
2.	Jum'at 29 Juli 2016	Manajemen dan Dasar Organisasi Perpustakaan	Ketua : Himayah, S.Ag., S.S., MIMS. Sekretaris : Drs. Nasruddin, MM. Penguji : Muh. Quraisy Mathar, S.Sos., M.Hum. Pelaksana : Niswa
3.	Jum'at 29 Juli 2016	Dasar-dasar Organisasi Informasi	Ketua : Himayah, S.Ag., S.S., MIMS. Sekretaris : Drs. Nasruddin, MM. Penguji : A. Ibrahim, S.Ag., S.S., M.Pd. Pelaksana : Niswa

Samata, 26 Juli 2016

Dekan,


Dr. H. Barsihannor, M. Ag
NIP. 19691012 199603 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No.63 Makassar Telp. 0411 – 868720, Fax.(0411)864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong, Gowa Telp. (0411) 841879 Fax. (0411) 8221400
Email: fak.adabhumaniora@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 106 / Tahun 2016**

**TENTANG
PANITIA PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI / MUNAQASYAH FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN ALAUDDIN MAKASSAR :

Membaca : Surat permohonan Saudari : **IRFAN PRAMADI FARYD**
Mahasiswa Jurusan : **IP / 40400111157**
Fak. Adab UIN Alauddin Tanggal : **07 November 2016**
Untuk memenuhi Ujian Skripsi / Munaqasyah yang berjudul :

**PENERAPAN KODE ETIK PUSTAKAWAN DI PERPUSTAKAAN UTSMAN BIN AFFAN UNIVERSITAS MUSLIM
INDONESIA MAKASSAR**

- Menimbang : a. Bahwa Saudara yang tersebut namanya di atas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi.
b. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu membentuk panitia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
4. Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 403 Tahun 1998 tentang Kurikulum IAIN Alauddin;
5. Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin;
6. Surat Keputusan Rektor IAIN Alauddin Makassar Nomor 42 Tahun 1993 tentang Penulisan dan Ujian Skripsi pada IAIN Alauddin;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 326.C Tahun 2014 tentang Kalender Kegiatan Akademik UIN Alauddin Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Pelaksana Ujian Skripsi / Munaqasyah Saudara tersebut di atas dengan komposisi dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian-ujian Skripsi sampai selesai dan memberi laporan kepada fakultas.
3. Ujian Skripsi / Munaqasyah tersebut akan dilaksanakan pada hari / tanggal : **Senin, 14 November 2016, Jam 09.00 s.d 11.00 Wita, Ruang Senat.**
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samata

Pada Tanggal 08 November 2016

Dekan,

**Dr. H. Barsihanner, M.Ag.
NIP. 19691012 199603 1 003**

LAMPIRAN :

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB & HUMANIORA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**


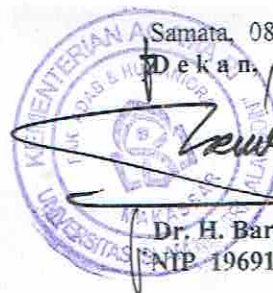
TANGGAL : 08 NOVEMBER 2016

NOMOR : 1067 TAHUN 2016

TENTANG

**KOMPOSISI PERSONALIA
PANITIA PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI / MUNAQASYAH
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Ketua	: Dr. Hj. Syamzan Syukur, M.Ag.
Sekretaris	: Himayah, S.Ag., S.S., MIMS.
Munaqisy I	: Hildawati Almah, S.Ag., S.S., MA.
Munaqisy II	: Marni, S.IP., M.IP.
Konsultan I	: Sitti Husaebah Pattah, S.Ag., S.S., M.Hum.
Konsultan II	: Drs. M. Jayadi, M.Ag.
Pelaksana	: Saparuddin, S.Hum.

Samata, 08 November 2016
Dekan,


Dr. H. Barsihannor, M.Ag.
NIP. 19691012 199603 1 003